

Volume 9, Nomor 1, April 2012

ISSN 1412-5382

Al-Hikmah

Jurnal Keilmuan Keislaman

Pendidikan Islam Pluralis: Membangun Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan

Analisis Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Rentabilitas
Koperasi Syariah BMT al-Amin Pekanbaru

Pengenalan Disiplin pada Anak Autis di TK Mustika Bunda Pekanbaru

Hubungan *Training* Emotional Spritual Quotient dengan Pergaulan Siswa

Pendidikan Berbasis Pesantren: Karakteristik Pendidikan
dan Unsur-unsur Kelembagaan

Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kecemasan Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi

Hubungan Tingkat Kematangan Beragama dengan Motivasi Membaca
Remaja Muslim SMAN 1 Bangkinang Barat Kampar

Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Al-Hikmah	Volume 9	Nomor 1	Hal. 1-110	Pekanbaru April 2012	ISSN 1412-5382
------------------	-----------------	----------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------

Penerbit : Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru Riau
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau
28284 Telp. (0761) 72126.

JURNAL KEILMUAN KEISLAMAN AL-HIKMAH

Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober berisi artikel tulisan ilmiah dalam bentuk hasil -hasil penelitian dan non penelitian (kajian analisis, aplikasi teori dan review) tentang masalah -masalah keilmuan keagamaan (pendidikan Islam, ekonomi syariah, politik Islam, dan lainnya). Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta menyebarluaskan kajian keilmuan keislaman sekaligus sebagai wahana komunikasi antara cendikiawan, dosen, praktisi, guru, mahasiswa dan pemerhati masalah keilmuan keislaman.

ISSN: 1412-5382

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Pemimpin Editor
Zulkifli Rusby

Dewan Editor
M. Yusuf Ahmad
Mawardi Ahmad
M. Ali Noer
Hamzah
Devi Arisanti
Miftah Syarif
Abu Samah
Daharmi Astuti

Editor Pelaksana
Syahraini Tambak

Kesekretariatan
Lolyta Permata
Najmi Hayati

Alamat Editor dan Sekretariat: Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru. Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau, 28284. Telp. (0761) 72126

Editor menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat dilihat pada **Panduan Bagi Penulis** di lembaran belakang jurnal ini. Artikel yang masuk ditelaah dewan editor dan dinilai kelayakannya oleh mitra bestari. Dewan editor dapat memodifikasi artikel untuk keseragaman format (gaya selingkung) tanpa merubah substansi artikel.

Pendidikan Islam Pluralis: Membangun Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan

SAHMIAR PULUNGAN

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara
dptk Universitas Sumatera Utara (USU) Medan
Jl. Badik NO. 17, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan,
Sumatera Utara. Kode Pos 20233

Abstrak: Perlunya memperbaharui dan mengembangkan kurikulum PAI yang berbasis keanekaragaman dengan suatu pertimbangan bahwa kurikulum dan metode merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Berhasil dan tidaknya suatu tujuan pendidikan tergantung kurikulum yang dipersiapkan dan metode yang digunakannya. Tidak relevannya kurikulum dan metode yang dikembangkan di suatu sekolah dengan realitas kehidupan yang dialami oleh siswa, menyebabkan siswa teralienasi dari lingkungannya dan tidak peka terhadap perkembangan yang terjadi disekitarnya. Hal ini berarti, dalam konteks globalisasi, sekolah tersebut telah "gagal" untuk mengantarkan peserta didiknya untuk menjadi "anak" yang cerdas, tanggap dan dapat bersaing dipasaran bebas. Pentingnya mereformasi kurikulum PAI dengan menampilkan wajah Islam toleran dapat dijelaskan dari sudut pandang filsafat perenialisme, esensialisme dan progresivisme. Dalam pandangan perenialisme kurikulum adalah "construct" yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan atau dikembangkan. Sementara dalam perspektif filsafat progresivisme, posisi kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa depan dimana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan. Dari sinilah sangat memungkinkan untuk mengajarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang humanis, demokratis dan berkeadilan kepada peserta didik. Sebuah prinsip-prinsip ajaran Islam yang sangat relevan untuk memasuki masa depan dunia yang ditandai dengan adanya keanekaragaman budaya dan agama.

Kata kunci: *islam, pendidikan, kurikulum, pluralis.*

PENDAHULUAN

Apakah sebenarnya pluralis itu? Kalau melacak dari beberapa sumber, dapatlah didefinisikan bahwa pluralis adalah sebuah paham tentang pluralitas. Paham, bagaimana melihat keragaman dalam agama-agama, mengapa dan

bagaimana memandang agama-agama, yang begitu banyak dan beragam. Apakah hanya ada satu agama yang benar atau semua agama benar.

Paham pluralis dengan begitu, sangat menghendaki terjadinya dialog antar-agama, dan dengan dialog agama

JURNAL KEILMUAN KEISLAMAN AL-HIKMAH

DAFTAR ISI

Pendidikan Islam Pluralis: membangun Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan <i>Sahmiar Pulungan (IAIN Sumatera Utara)</i>	1 - 18
Analisis Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas terhadap Rentabilitas Koperasi Syariah BMT al-Amin Pekanbaru <i>Zulkifli Rusby, Lolyta Permata & Ali Wardana (Universitas Islam Riau)</i>	19 - 36
Pengenalan Disiplin pada Anak Autis di TK Mustika Bunda Pekanbaru <i>Susi Herlinda (STKIP 'Aisyiyah Riau)</i>	37 - 46
Hubungan <i>Training</i> Emotional Spritual Quotient dengan Pergaulan Siswa <i>M. Ali Noer, Syahraini Tambak, & Syamrida (Universitas Islam Riau)</i>	47 - 61
Pendidikan Berbasis Pesantren: Karakteristik Pendidikan dan Unsur-unsur Kelembagaan <i>Muhammad Syaifudin (UIN Sultan Syarif Kasim Riau)</i>	62 - 76
Pengaruh Efikasi Diri terhadap Kecemasan Mahasiswa dalam Menyusun Skripsi <i>Irma Kusuma Salim (Universitas Islam Riau)</i>	77 - 88
Hubungan Tingkat Kematangan Beragama dengan Motivasi Membaca Remaja Muslim SMAN 1 Bangkinang Barat Kampar <i>Rahmah (STKIP 'Aisyiyah Riau)</i>	89 - 100
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Perbankan Syariah <i>Zulkifli Rusby (Universitas Islam Riau)</i>	101 - 110

Mitra Bestari

Panduan Bagi Penulis

memungkinkan antara satu agama terhadap agama lain untuk mencoba memahami cara baru yang mendalam mengenai bagaimana Tuhan mempunyai jalan penyelamatan. Pengalaman ini, saya kira sangat penting untuk memperkaya pengalaman antar iman, sebagai pintu masuk ke dalam dialog teologis. Inilah sebuah teologi yang menurut Smith (1981: 187) disebut dengan istilah *world theology* (teologi dunia) dan oleh Hick (1980: 8) disebutnya *global theology* (teologi global). Kemudian teologi tersebut belakangan ini terkenal dengan sebutan teologi pluralis.

Pengakuan terhadap pluralis agama dalam suatu komunitas umat beragama menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusifitas yang bermuara pada tumbuhnya kepekaan terhadap berbagai kemungkinan unik yang bisa memperkaya usaha manusia dalam mencari kesejahteraan spritual dan moral. Gagasan bahwa manusia adalah satu umat, seperti ini menurut Sachedina "merupakan dasar pluralis teologis yang menuntut adanya kesetaraan hak yang diberikan Tuhan bagi semua. Manusia tetap merupakan "satu bangsa" berdasarkan kemanusiaan yang sama-sama mereka miliki. Karena itulah diperlukan suatu "etika global" yang bisa memberikan dasar pluralistik untuk memperantarai hubungan antar agama di antara orang-orang yang memiliki komitmen spritual berbeda".

Pengertian dan tujuan pluralis seperti itu, sebenarnya telah lama menimbulkan perdebatan di kalangan umat beragama. Sampai akhirnya, pembicaraan mengenai pluralisme sempat "menghangat" kembali ketika MUI melalui fatwanya, menyatakan bahwa pluralisme adalah paham yang sesat dan sangat membahayakan, karena dianggap sebagai paham yang menyebarkan "semua agama adalah benar". Fatwa MUI yang melarang pluralis seperti itu, kemudian menunai

banyak protes dari masyarakat luas. Karena dianggap fatwa MUI seperti itu akan sangat membahayakan bagi integritas bangsa Indonesia yang pluralistik. Bahkan, salah satu dari ketua MUI ketika menanggapi protes dari berbagai kalangan, ada yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang protes itu berdasarkan akal, sedangkan ulama (MUI) berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Padahal bila memahami dan mempelajari pengertian dari pluralis yang dimaksud, pastilah akan secara arif dapat menerimanya. Bukankah pluralis pada dasarnya justru sangat *compatible* dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Apalagi kalau mau membaca sejarah, pasti dapat menyimpulkan bahwa meskipun Islam merupakan agama termuda dalam tradisi Ibrahimiyah. Pemahaman diri Islam sejak kelahirannya pada abad ke-7 justru sudah melibatkan unsur kritis pluralis, yaitu hubungan Islam dengan agama lain. Dan agama Ibrahimiyah termuda ini sebenarnya bisa mengungkap diri dalam suatu dunia agama pluralistik. Islam mengakui dan menilainya secara kritis, tapi tidak pernah menolaknya atau menganggapnya salah.

Bahkan menurut al-Quran sendiri, pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau *Sunnah Allah*, dan bahwa hanya Allah yang tahu dan dapat menjelaskan, di hari akhir nanti, mengapa manusia berbeda satu dari yang lain, dan mengapa jalan manusia berbeda-beda dalam beragama. Dalam al-Qur'an disebutkan, yang artinya: "*Untuk masing-masing dari kamu (umat manusia) telah kami tetapkan Hukum (Syari'ah) dan jalan hidup (minhaj).* Jika Tuhan menghendaki, maka tentulah ia jadikan kamu sekalian umat yang tunggal (*monolitik*). Namun ia jadikan kamu sekalian berkenaan dengan hal-hal yang telah dikarunia-Nya kepada kamu. Maka berlombalah kamu sekalian

untuk berbagai kebajikan. Kepada Allah-lah tempat kalian semua kembali; maka Ia akan menjelaskan kepadamu sekalian tentang perkara yang pernah kamu perselisihkan." (QS. al-Maidah: 48).

Demi tujuan itu, maka pendidikan dianggap sebagai instrumen penting. Sebab, "pendidikan" sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang dididiknya, dan mampu menjadi "*guiding light*" bagi generasi muda penerus bangsa. Dalam konteks inilah, pendidikan agama sebagai media penyadaran umat perlu membangun teologi inklusif dan pluralis, demi harmonisasi agama-agama (yang telah menjadi kebutuhan masyarakat agama sekarang).

Hal tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa salah satu peran dan fungsi pendidikan agama diantaranya adalah untuk meningkatkan keberagaman peserta didik dengan keyakinan agama sendiri, dan memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan memper-masalahkan agama lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi (Sealy, 1986: 43-44). Ini artinya, pendidikan agama pada prinsipnya, juga ikut andil dan memainkan peranan yang sangat besar dalam menumbuh-kembangkan sikap-sikap pluralis dalam diri siswa.

Apalagi, kalau mencermati pernyataan yang telah disampaikan oleh Rodger (1982: 61) bahwa "pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya dan berfungsi untuk membantu perkembangan pengertian yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berbeda iman, sekaligus juga untuk memperkuat ortodoksi keimanan bagi mereka". Artinya pendidikan agama adalah sebagai wahana untuk mengeksplorasi sifat dasar keyakinan agama di dalam proses pendidikan dan

secara khusus mempertanyakan adanya bagian dari pendidikan keimanan dalam masyarakat. Pendidikan agama dengan begitu, seharusnya mampu merefleksikan persoalan pluralis, dengan mentransmisikan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan sikap toleran, terbuka dan kebebasan dalam diri generasi muda.

Organisasi sekolah dan atmosfirnya harus mampu mewujudkan jalan menuju kehidupan secara personal dan sosial. Sekolah harus dapat mempraktekkan sesuatu yang telah diajarkannya. Dengan demikian, lingkungan sekolah tersebut dapat dijadikan percontohan oleh murid-murid untuk *learning by doing*. Di sekolah, peserta didik seharusnya dapat mempelajari adanya kurikulum-kurikulum umum pada kelas-kelas heterogen. Hal ini diperlukan guna mendorong adanya persamaan ideal, membangun perasaan persamaan, dan memastikan adanya *input* dari peserta didik yang memiliki latar belakang berbeda.

Adanya serentetan kerusuhan-kerusuhan yang berbau SARA di Indonesia, menunjukkan bahwa secara kolektif sebenarnya tidak mau belajar tentang bagaimana hidup secara bersama secara rukun. Bahkan, dapat dikatakan, agen-agen sosialisasi utama seperti keluarga dan lembaga pendidikan, tampaknya tidak berhasil menanamkan sikap toleransi-inklusif dan tidak mampu mengajarkan untuk hidup bersama dalam masyarakat plural. Di sinilah letak pentingnya sebuah ikhtiar menanamkan teologi pluralis melalui pendidikan agama. Sehingga, masyarakat Indonesia akan mampu membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama. Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan, dan solidaritas.

Melalui pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis ke-

majemukan dengan mempertimbangkan pengembangan komponen-komponen dapat dijadikan sebagai jawaban atau solusi alternatif bagi keinginan untuk merespon persoalan-persoalan di atas. Sebab dalam pendidikannya, pemahaman Islam yang hendak dikembangkan oleh pendidikan berbasis pluralis adalah pemahaman dan pemikiran yang bersifat inklusif.

Melalui sistem pendidikannya, sebuah pendidikan yang berbasis pluralis akan berusaha memelihara dan berupaya menumbuhkan pemahaman yang inklusif pada peserta didik. Dengan suatu orientasi untuk memberikan penyadaran terhadap para peserta didiknya akan pentingnya saling menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan agama-agama lain.

ISLAM DAN PLURALIS

Dalam Islam, berteologi secara inklusif dengan menampilkan wajah agama secara santun dan ramah sangat dianjurkan. Islam bahkan memerintahkan umat Islam untuk dapat berinteraksi terutama dengan agama Kristen dan Yahudi dan dapat menggali nilai-nilai keagamaan melalui diskusi dan debat intelektual/teologis secara bersama-sama dan dengan cara yang sebaik-baiknya (QS. al-Ankabut: 46), tentu saja tanpa harus menimbulkan *prejudice* atau kecurigaan di antara mereka.

Al-Qur'an merupakan kunci untuk menemukan dan memahami konsep persaudaraan Islam-terhadap agama lain--pluralitas adalah salah satu kenyataan objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau *Sunnah Allah*, sebagaimana firman Allah SWT: "*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang*

paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengetahui" (QS. al-Hujurat, 49: 13).

Bila mencermati ayat tersebut, secara kritis dan penuh keterbukaan, ditemukan suatu pemahaman bahwa Allah SWT sendiri sebenarnya secara tegas telah menyatakan bahwa ada kemajemukan di muka bumi ini. Perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan suku bangsa; ada orang Indonesia, Jerman, Amerika, orang Jawa, Sunda atau Bule, adalah realitas pluralitas yang harus dipandang secara positif dan optimis. Perbedaan itu, harus diterima sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin atas dasar kenyataan itu. Bahkan manusia disuruh untuk menjadikan pluralitas tersebut, sebagai instrumen untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah SWT, dengan jalan mengadakan interaksi sosial antara individu, baik dalam konteks pribadi atau bangsa.

Bahkan konsep *unity in diversity*, dalam Islam telah diakui keabsahannya dalam kehidupan ini. Untuk mendukung pernyataan ini, dapat dilacak kebenarannya dalam perjalanan sejarah yang telah ditunjukkan oleh al-Qur'an, bahwa Islam telah memberi karakter positif kepada komunitas non-Muslim. Ini bisa dilihat, misalnya, dari berbagai istilah *eufemisme*, mulai dari *ahl al-kitab*, *shabih bi ah al-kitab*, *din Ibrahim* sampai *dinan hanifan*. Dan secara spesifik, Islam mengilustrasikan karakter para pemuka agama Kristen sebagai manusia dengan sifat rendah hati (*la yastakbirun*) serta pemeluk agama Nasrani sebagai kelompok dengan jalinan emosional (*aqrabahum mawaddatan*) terdekat dengan komunitas Muslim (QS. al-Maidah: 82).

Dalam kaitannya yang langsung dengan prinsip untuk dapat menghargai agama lain dan dapat menjalin persahabatan dan perdamaian dengan

adalah jelas memandang dirinya sebagai mata rantai kritis dalam pengalaman pewahyuan umat manusia—satu jalan universal yang dimaksudkan untuk semua makhluk. Secara khusus, Islam juga memiliki etos biblikal dan Kristen, dan Islam memiliki sikap yang luar biasa inklusif terhadap Ahli Kitab, yang dengan merekalah Islam terhubungkan melalui manusia pertama di muka bumi.

Sedangkan secara umum, pandangan Islam terhadap agama lain (Ahli Kitab—pen) sangat positif dan sangat konstruktif. Hal ini dapat dilihat dari nilai dan ajarannya yang memberikan peluang dan mendorong kepada umat Islam untuk dapat melakukan interaksi sosial, kerja sama dengan mereka. Tentang hal ini, Farid Asaek (2000: 206-207), telah menunjukkan bukti-bukti sebagai berikut;

Pertama, Ahli Kitab, sebagai penerima wahyu, diakui sebagai bagian dari komunitas. Ditujukan kepada semua nabi, al-Qur'an mengatakan: "*Dan sungguh inilah umatmu, umat yang satu*" (QS. al-Mu'minun: 52). Sehingga konsep Islam tentang para pengikut Kitab Suci atau Ahli Kitab yaitu konsep yang memberikan pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain, yang memiliki Kitab Suci dengan memberikan kebebasan menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Kedua, dalam dua bidang sosial terpenting, makanan dan perkawinan, sikap murah hati al-Qur'an terlihat jelas, bahwa makanan "orang-orang yang diberi Alkitab" dinyatakan sebagai sah (halal) bagi kaum muslim dan makanan kaum muslim sah bagi mereka (QS al-Maidah: 5). Demikian juga, pria muslim diperkenankan mengawini "wanita suci dari Ahli Kitab" (QS. al-Maidah: 5). Jika kaum Muslim diperkenankan hidup berdampingan dengan golongan lain dalam hubungan yang seintim hubungan perkawinan, ini menunjukkan secara eksplisit bahwa permusuhan tidak di-

anggap sebagai norma dalam hubungan Muslim-kaum lain.

Ketiga, dalam bidang hukum agama, norma-norma dan peraturan kaum Yahudi dan Nasrani diakui (QS al-Maidah: 47) dan bahkan dikuatkan oleh Nabi ketika beliau diseru untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka (QS al-Maidah: 42-43). *Keempat*, kesucian kehidupan religius penganut agama wahyu lainnya ditegaskan oleh fakta bahwa izin pertama yang pernah diberikan bagi perjuangan bersenjata dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya kesucian ini, "Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobahkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja dan sinagog-sinagog orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak di sebut nama Allah" (QS al-Haji: 40).

Perintah Islam agar umatnya bersikap toleran, bukan hanya pada agama Yahudi dan Kristen, tetapi juga kepada agama-agama lain. Ayat 256 surat al-Baqarah mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam soal agama karena jalan lurus dan benar telah dapat dibedakan dengan jelas dari jalan salah dan sesat. Terserahlah kepada manusia memilih jalan yang dikehendakinya. Telah dijelaskan mana jalan benar yang akan membawa kepada kesengsaraan. Manusia merdeka memilih jalan yang dikehendakinya. Kemerdekaan ini diperkuat oleh ayat 6 surat al-Kafirun yang mengatakan: *Bagimulah agamamu dan bagiku agamaku*.

Demikianlah beberapa prinsip dasar al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah pluralis dan anjuran untuk dapat menunjukkan sikap saling menghormati, ramah dan bersahabat dengan agama Kristen, secara khusus. Dengan begitu, jauh-jauh hari, al-Qur'an sesungguhnya telah mensinyalir akan munculnya bentuk

"*truth claim*" (Abdullah, 1999: 68). Baik itu dalam wilayah intern umat beragama maupun wilayah antar-umat beragama. Kedua-duanya, sama-sama tidak *favourable* dan tidak kondusif bagi upaya membangun tata pergaulan masyarakat pluralistik yang sehat.

Oleh al-Qur'an, kecendrungan manusia untuk mengantongi "*truth claim*" yang potensial untuk eksplosif dan destruktif itu, kemudian dinetralisir dalam bentuk anjuran untuk selalu waspada terhadap bahaya ekstrimitas dalam berbagai bentuknya. Dan manusia Muslim sendiri dituntut untuk senantiasa merendahkan hati dan bersedia dengan "*kebenaran*" (*al-haq*) dan kesabaran (*al-Shabar*) dalam setiap langkah dalam perjalanan hidupnya (surat al-Ashr: 1-3).

Paling tidak, dalam tataran konseptual, al-Qur'an telah memberi resep atau arahan-arahan yang sangat diperlukan bagi manusia Muslim untuk memecahkan masalah kemanusiaan universal, yaitu realitas pluralitas keberagamaan manusia dan menuntut supaya bersikap toleransi terhadap kenyataan tersebut demi tercapainya perdamaian di muka bumi. Karena Islam menilai bahwa syarat untuk membuat keharmonisan adalah pengakuan terhadap komponen-komponen yang secara alamiah berbeda.

Dengan begitu, dapat pula dikatakan konsepsi pluralis dalam Islam sudah terbawa pada misi awal agama ini diturunkan, yakni membawa kasih terhadap seluruh alam tanpa batas-batas atau benturan-benturan dimensi apapun. Semua orang yang mengaku Islam haruslah menunjukkan sikap saling "*mengasihi*" kepada sesama manusia. Karena seseorang bisa disebut sebagai seorang muslim, menurut kanjeng nabi adalah *Al-Muslimu man salima Al-muslimuna min lisanihi wa yadihi*. Maksudnya adalah seorang muslim yang

senantiasa menebarkan sikap damai dan rasa aman dihati masyarakatnya.

PERLUNYA PENDIDIKAN ISLAM PLURALIS

Berangkat dari kesadaran adanya fenomena bahwa "satu Tuhan, banyak agama" merupakan fakta dan realitas yang dihadapi manusia sekarang. Maka, manusia sekarang harus didorong menuju kesadaran bahwa pluralis memang sungguh-sungguh fitrah kehidupan manusia.

Mendorong setiap orang untuk dapat menghargai "keanekaragaman" adalah sangat penting segera dilakukan, terutama sekali di negara Indonesia yang pluralistik ini. Dampak krisis multi-dimensional yang melandanya, menyebabkan bangsa Indonesia menghadapi berbagai problem sosial. Salah satu problem besar dimana peran agama menjadi sangat dipertanyakan adalah konflik etnis, kultur dan religius, atau yang lebih dikenal dengan SARA.

Kegagalan agama dalam memainkan perannya sebagai problem solver bagi persoalan SARA erat kaitanya dengan pengajaran agama secara eksklusif. Maka, agar bisa keluar dari kemelut yang mendera bangsa Indonesia terkait persoalan SARA, sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk memunculkan wajah pendidikan agama yang inklusif dan humanis.

Pada tataran teologis, dalam pendidikan agama perlu mengubah paradigma teologis yang pasif, tektualis, dan eksklusif. Menuju teologi yang saling menghormati, saling mengakui eksistensi, berfikir dan bersikap positif, serta saling memperkaya iman. Hal ini dengan tujuan untuk membangun interaksi umat beragama dan antarumat beragama yang tidak hanya berkoeksistensi secara

harmonis dan damai, tetapi juga bersedia aktif dan pro-aktif kemanusiaan.

Sebenarnya masyarakat Indonesia telah lama akrab dengan diktum Bhinneka Tunggal Ika. Namun sayangnya, konsep ini telah mengalami pemelintiran makna dan bias interpretasi, terutama sepanjang pemerintahan Orde Baru. Kebijakan sosial-politik saat itu cenderung uniformistik, sehingga tampaknya budaya milik kelompok dominanlah yang diajarkan dan disalurkan oleh sekolah dari satu generasi kepada generasi lainnya.

Sekolah pada saat itu juga ditengarai hanya merefleksikan dan menggemakan stereotip dan prasangka antarkelompok yang sudah terbentuk dan beredar dalam masyarakat, tidak berusaha menetralisasi dan menghilangkannya. Bahkan, ada indikasi bahwa sekolah ikut mengembangkan prasangka dan mengescalasi ketegangan antarkelompok melalui perundang-undangan yang mengkotak-kotakkan penyampaian pendidikan agama, isi kurikulum yang etnosentris, dan dinamika relasi sosial antarsekolah yang segregatif (Khisbiyah, 2000: 156-157). Bukan tak mungkin segregasi sekolah berdasarkan kepelembutan agama juga ikut memperuncing prasangka dan proses demonisasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, baik secara langsung maupun atau tidak langsung.

Padahal, "keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi adalah suatu realita masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun demikian, keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan aspirasi politik yang seharusnya menjadi faktor yang diperhitungkan dalam penentuan filsafat, teori, visi, pengembangan dokumen, sosialisasi kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum, nampaknya belum dijadikan sebagai faktor yang harus diper-timbangkan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan di negara kita" (Hasan, 2000:

511). Maka, akibatnya, wajar manakala terjadi kegagalan dalam pendidikannya (termasuk pendidikan agama), terutama sekali dalam menumbuhkan sikap-sikap untuk menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat.

Selain itu, Kautsar Azhari Noe (2001) menyebutkan, paling tidak ada empat faktor penyebab kegagalan pendidikan agama dalam menumbuhkan pluralis. Pertama, penekannya pada proses transfer ilmu agama ketimbang pada proses transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak didik; kedua, sikap bahwa pendidikan agama tidak lebih dari sekedar sebagai "hiasan kurikulum" belaka, atau sebagai "pelengkap" yang dipandang sebelah mata; ketiga, kurangnya penekanan pada penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antaragama seperti cinta, kasih sayang, persahabatan, suka menolong, suka damai dan toleransi; dan keempat, kurangnya perhatian untuk memperhatikan untuk mempelajari agama agama lain (Noer dalam Sumartana, 2001: 239-240).

Melihat realitas tersebut, bahkan ditambah dengan adanya banyak konflik kekerasan, dan bahkan kekejaman yang dijalankan atas nama agama, sebagaimana tersebut di atas, seharusnya yang menjadi tujuan refleksi atas pendidikan agama adalah mampu melakukan transformasi kehidupan beragama itu sendiri dengan melihat sisi ilahi dan sosial-budayanya. Pendidikan agama harus mampu menanamkan cara hidup yang lebih baik dan santun kepada peserta didik. Sehingga sikap-sikap seperti saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman agama dan budaya dapat tercapai di tengah-tengah masyarakat plural.

Dengan menyadari bahwa masyarakat kita terdiri dari banyak suku dan beberapa agama, jadi sangat pluralis

Maka, pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak diperlukan. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya, menumbuhkan akan tata nilai, memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama, mengembangkan sikap saling memahami, serta mengerjakan keterbukaan dan dialog. Bentuk pendidikan seperti inilah yang banyak ditawarkan oleh "banyak ahli" dalam rangka mengantisipasi konflik keagamaan dan menuju perdamaian abadi, yang kemudian terkenal dengan sebutan "pendidikan pluralis".

Apakah sebenarnya pendidikan pluralis itu? Kalau kita melacak referensi tentang pendidikan pluralis, banyak sekali literatur mengenai pendidikan tersebut atau sering dikenal orang dengan sebutan "pendidikan multikultural". Namun literatur-literatur tersebut menunjukkan adanya keragaman dalam pengertian istilah. Sleeter (dalam Burnet, 1991: 1) mengartikan pendidikan multikultural sebagai *any set of proses by which schools work with rather than against oppressed group*. Banks, dalam bukunya *Multicultural education: historical development, dimension, and practice* (1993) menyatakan bahwa meskipun tidak ada konsensus tentang itu ia berkesimpulan bahwa di antara banyak pengertian tersebut maka yang dominan adalah pengertian pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*.

Lebih jelasnya, menariklah kalau kita memperhatikan suatu definisi tentang pendidikan pluralis yang disampaikan Frans Magnez Suseno (dalam Suara Pembaharuan, 23 September, 2000), yaitu suatu pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan

agama kita sehingga kita mampu melihat "kemanusiaan" sebagai sebuah keluarga yang memiliki baik perbedaan maupun kesamaan cita-cita. Inilah pendidikan akan nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk perdamaian, kemerdekaan, dan solidaritas.

Senada dengan itu, Ainurrofiq Dawam menjelaskan definisi pendidikan multikultural sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku, dan aliran (agama). Pengertian pendidikan multikultural yang demikian, tentu mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan. Karena pendidikan itu sendiri secara umum dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dimana pun dia datang dan berbudaya apa pun dia. Harapannya, sekilas adalah terciptanya kedamaian yang sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan, kesejahteraan yang tidak dihantui manipulasi, dan kebahagiaan yang terlepas dari jaring-jaring manipulasi rekayasa sosial.

Muhammad Ali (dalam Kompas, 26 April 2002) menyebut pendidikan yang berorientasi pada proses penyadaran yang berwawasan pluralis secara agama sekaligus berwawasan multikultural, seperti itu, dengan sebutan "pendidikan pluralis multikultural". Menurutnya, pendidikan semacam itu harus dilihat sebagai bagian dari upaya komprehensif mencegah dan menaggulangi konflik etnis agama, radikalisme agama, separatisme, dan integrasi bangsa, sedangkan nilai dasar dari konsep pendidikan ini adalah toleransi.

Memperhatikan beberapa definisi tentang pendidikan pluralis tersebut di atas, secara sederhana dapatlah pendidikan pluralis didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman keagamaan dan kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Pendidikan disini, dituntut untuk dapat merespon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok.

KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KEMAJEMUKAN

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan, karena itu perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Pemikiran ini mengandung konsekuensi bahwa penyempurnaan atau perbaikan kurikulum pendidikan agama Islam adalah untuk mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan dengan diselaraskan terhadap perkembangan kebutuhan dunia usaha atau industri, perkembangan dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Konsep yang sekarang banyak diwacanakan oleh banyak ahli adalah kurikulum pendidikan berbasis pluralis.

Sebagaimana disebut di atas, bahwa konsep pendidikan pluralis adalah pendidikan yang berorientasi pada realitas persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan umat manusia secara keseluruhan. Pendidikan pluralis digagas

dengan semangat besar "untuk memberikan sebuah model pendidikan yang mampu menjawab tantangan masyarakat pasca modernisme".

Melihat realitas tersebut, maka menurut Syamsul Ma'arif (2006: 15), disinilah letak pentingnya menggagas pendidikan Islam berbasis pluralis dengan menonjolkan beberapa karakter sebagai berikut; *pertama* pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan umum yang bercirikan Islam. Artinya, di samping menonjolkan pendidikannya dengan penguasaan atas ilmu pengetahuan, namun karakter keagamaan juga menjadi bagian integral dan harus dikuasai serta menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Tentunya, ini masih menjadi pertanyaan, apakah sistem pendidikan seperti ini betul-betul mampu membongkar sakralitas ilmu-ilmu keagamaan dan dikhotomi keilmuan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu keagamaan.

Kedua; Pendidikan Islam juga harus mempunyai karakter sebagai pendidikan yang berbasis pada pluralitas. Artinya, bahwa pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak menciptakan suatu pemahaman yang tunggal, termasuk di dalamnya juga pemahaman tentang realitas keberagaman. Kesadaran pluralis merupakan suatu keniscayaan yang harus disadari oleh setiap peserta didik. Tentunya, kesadaran tersebut tidak lahir begitu saja, namun mengalami proses yang sangat panjang, sebagai realitas pemahaman yang komprehensif dalam melihat suatu fenomena.

Ketiga; Pendidikan Islam harus mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan yang menghidupkan sistem demokrasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan yang memberikan keluasaan pada siswa untuk mengekspresikan pendapatnya secara bertanggung jawab. Sekolah memfasilitasi adanya "mimbar

bebas", dengan memberikan kesempatan kepada semua civitas untuk berbicara atau mengkritik tentang apa saja, asal bertanggung jawab. Tentunya, sistem demokrasi ini akan memberikan pendidikan pada siswa tentang realitas sosial yang mempunyai pandangan dan pendapat yang berbeda. Di sisi yang lain, akan membudayakan "reasoning" bagi civitas di lembaga pendidikan Islam.

Perlunya membentuk pendidikan Islam berbasis pluralis tersebut, sekali lagi merupakan suatu inisiasi yang lahir dari realitas sejarah pendidikan khususnya di Indonesia yang dianggap gagal dalam membangun citra kemanusiaan. Dimana umumnya, pendidikan umum hanya mencetak orang-orang yang pintar namun tidak mempunyai integritas keilmuan dan akhlaq ilmunan. Ini yang kemudian melahirkan para koruptor yang justru menjadi penyakit dan menyengsarakan bangsa ini. Di satu sisi, pendidikan agama yang ada hanya menciptakan ahli agama yang cara berpikirnya parsial dan sempit. Akhirnya, semakin banyak orang pintar ilmu agama semakin kuat pertentangan dan konflik dalam kehidupan. Inilah sistem pendidikan yang gagal dalam menciptakan citra kemanusiaan.

Untuk merealisasikan cita-cita pendidikan yang mencerdaskan seperti tersebut, lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan sistem pengajaran yang berorientasi pada penanaman kesadaran pluralis dalam kehidupan. Adapun beberapa program pendidikan yang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran pluralis adalah: pendidikan sekolah harus membekali para mahasiswa atau peserta didik dengan kerangka (*frame work*) yang memungkinkannya menyusun dan memahami pengetahuan yang diperoleh dari lingkungannya (UNESCO, 1981).

Karena masyarakat kita majemuk, maka kurikulum PAI yang ideal adalah kurikulum yang dapat menunjang proses

siswa menjadi manusia yang demokratis, pluralis dan menekankan penghayatan hidup serta refleksi untuk menjadi manusia yang utuh, yaitu generasi muda yang tidak hanya pandai tetapi juga bermoral dan etis, dapat hidup dalam suasana demokratis satu dengan lain, dan menghormati hak orang lain.

Selain itu, perlu kiranya memperhatikan kurikulum sebagai proses. Ada empat hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses ini, yaitu; (1) posisi siswa sebagai subjek dalam belajar, (2) cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya, (3) lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah *entry behaviour* kultur siswa, (4) lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar (Hamid, *op cit*: 522). Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan mestilah mencakup subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.

Bentuk kurikulum dalam pendidikan agama Islam hendaknya tidak lagi ditujukan pada siswa secara individu menurut agama yang dianutnya, melainkan secara kolektif dan berdasarkan kepentingan bersama. Bila selama ini setiap siswa memperoleh pelajaran agama sesuai dengan agamanya, maka diusulkan agar lebih baik bila setiap siswa SLTP-PT memperoleh materi agama yang sama, yaitu berisi tentang sejarah pertumbuhan semua agama yang berkembang di Indonesia. Sedangkan untuk SD diganti dengan pendidikan budi pekerti yang lebih menanamkan nilai-nilai moral kemanusiaan dan kebaikan secara universal. Dengan materi seperti itu, di samping siswa dapat menentukan agamanya

sendiri (bukan berdasarkan keturunan), juga dapat belajar memahami pluralitas berdasarkan kritisnya, mengajarkan keterbukaan, toleran, dan tidak eksklusif, tapi inklusif (Darmaningtyas, 1999: 165).

Amin Abdullah (2001: 13-16) menyarankan "perlunya rekonstruksi pendidikan sosial-keagamaan untuk memperteguh dimensi kontrak sosial-keagamaan dalam pendidikan agama". Dalam hal ini, kalau selama ini praktek di lapangan, pendidikan agama Islam masih menekankan sisi keselamatan yang dimiliki dan didambakan oleh orang lain di luar diri dan kelompoknya sendiri—jadi materi pendidikan agama lebih berfokus dan sibuk mengurus urusan untuk kalangan sendiri (*individual* atau *private affairs*). Maka, pendidikan agama Islam perlu direkonstruksi kembali, agar lebih menekankan proses edukasi sosial, tidak semata-mata individual dan untuk memperkenalkan konsep *social-contract*. Sehingga pada diri peserta didik tertanam suatu keyakinan, bahwa kita semua sejak semula memang berbeda-beda dalam banyak hal, lebih-lebih dalam bidang akidah, iman, credo, tetapi demi untuk menjaga keharmonisan, keselamatan, dan kepentingan kehidupan bersama, mau tidak mau, kita harus rela untuk menjalin kerjasama (*cooperation*) dalam bentuk kontrak sosial antar sesama kelompok warga masyarakat.

Pendek kata, agar maksud dan tujuan pendidikan agama Islam berbasis pluralis dapat tercapai, kurikulumnya harus didesain sedemikian rupa dan *favourable* untuk semua tingkatan dan jenjang pendidikan. Namun demikian, pada level sekolah dasar dan menengah adalah paling penting, sebab pada tingkatan ini, sikap dan perilaku peserta didik masih siap dibentuk. Dan perlu diketahui, suatu kurikulum tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya keterlibatan, pembuatan dan kerjasama

secara langsung antara para pembuat kurikulum, penulis *text book* dan guru.

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pembuat kurikulum, penulis *text book* dan guru untuk mengembangkan kurikulum PAI berbasis pluralis di Indonesia, adalah sebagai berikut; *Pertama*, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat dasar, filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme haruslah dapat diubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat bangsa, dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanisme, progresifisme, dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum.

Kedua, teori kurikulum tentang konten (*curriculum content*) haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang berisikan fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang mencakup pula nilai, moral, prosedur, dan ketrampilan yang harus dimiliki generasi muda.

Ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.

Keempat, proses belajar yang dikembangkan untuk siswa haruslah pula

berdasarkan proses yang memiliki tingkat *isomorphism* yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan siswa belajar individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam suatu situasi positif. Dengan cara demikian maka perbedaan antar-individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai keragaman budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.

Kelima, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan alternatif assesment (portfolio, catatan, observasi, wawancara) dapat digunakan.

Di samping perlunya memperhatikan langkah-langkah itu, untuk menuju sebuah PAI yang menghargai pluralis, sebenarnya selain aspek kurikulum yang harus didesain, sebagaimana telah penulis uraikan, aspek pendekatan dan pengajaran. Pola-pola lama dalam pendekatan atau pengajaran agama harus segera dirubah dengan model baru yang lebih mengalir dan komunikatif. Aspek perbedaan harus menjadi titik tekan dari setiap pendidik. Pendidik harus sadar betul bahwa masing-masing peserta didik merupakan "manusia yang unik" (*human unique*), karena itu tidak boleh ada penyeragaman-peyeragaman. Dalam perspektif ini, pendidikan agama Islam yang memberikan materi kajian perbandingan agama dan nilai-nilai prinsip Islam seperti; toleransi, keadilan, kebebasan dan demokrasi—untuk memperoleh suatu pemahaman di antara

orang-orang yang berbeda iman itu—adalah sebuah keniscayaan.

ISLAM TOLERAN DALAM KURIKULUM

Mengembangkan sikap pluralis pada peserta didik di era sekarang ini, adalah mutlak segera "dilakukan" oleh seluruh pendidikan agama di Indonesia demi kedamaian sejati. Pendidikan agama Islam perlu segera menampilkan ajaran-ajaran Islam yang toleran melalui kurikulum pendidikannya dengan tujuan dan menitikberatkan pada pemahaman dan upaya untuk bisa hidup dalam konteks perbedaan agama dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusifisme kelompok agama dan budaya yang sempit. Sehingga sikap-sikap pluralis itu akan dapat ditumbuhkembangkan dalam diri generasi muda kita melalui dimensi-dimensi pendidikan agama dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut:

Pertama, pendidikan agama seperti fiqih, tafsir tidak harus bersifat linier, namun menggunakan pendekatan *muqaron*. Ini menjadi sangat penting, karena anak tidak hanya dibekali pengetahuan atau pemahaman tentang ketentuan hukum dalam fiqih atau makna ayat yang tunggal, namun juga diberikan pandangan yang berbeda. Tentunya, bukan sekedar mengetahui yang berbeda, namun juga diberikan pengetahuan tentang mengapa bisa berbeda.

Kedua, untuk mengembangkan kecerdasan sosial, siswa juga harus diberikan pendidikan lintas agama. Hal ini dapat dilakukan dengan program dialog antar agama yang perlu diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam. Sebagai contoh, dialog tentang "puasa" yang bisa menghadirkan para bikhsu atau agamawan dari agama lain. Program ini menjadi sangat strategis, khususnya untuk

manusia, antar sesama manusia dan dengan menggunakan bahasa manusia.

Tujuan untuk menumbuhkan saling menghormati kepada semua manusia yang memiliki iman berbeda atau mazhab berbeda dalam beragama, salah satunya bisa diajarkan lewat pendidikan akidah yang inklusif. Dalam pembelajarannya, tentu saja memberikan perbandingan dengan akidah yang dimiliki oleh agama lain (perbandingan agama). Meminjam bahasanya Rodger (1982: 61-62), pendidikan akidah seperti itu mensyaratkan adanya *fairly and sensitively* dan bersikap terbuka (*open minded*). Tentu saja, pengajaran agama seperti itu, sekaligus menuntut untuk bersikap "objektif" sekaligus "subjektif". Objektif, maksudnya sadar bahwa membicarakan banyak iman secara fair itu tanpa harus meminta pertanyaan mengenai benar atau validnya suatu agama. Subjektif berarti sadar bahwa pengajaran seperti itu sifatnya hanyalah untuk mengantarkan setiap peserta didik memahami dan merasakan sejauh mana keimana tentang suatu agama itu dapat dirasakan oleh orang yang mempercayainya.

Melalui pengajaran akidah inklusif seperti itu, tentu saja bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena hal itu adalah sesuatu yang absurd dan agak mengkhianati tradisi suatu agama. yang dicari adalah mendapatkan titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh masing-masing agama. setiap agama mempunyai sisi ideal secara filosofis dan teologis, dan inilah yang dibanggakan penganut suatu agama, serta yang akan menjadikan mereka tetap bertahan, jika mereka mencari dasar rasional atas keimanan mereka. Akan tetapi, agama juga mempunyai sisi real, yaitu suatu agama menyejarah dengan keagungan atau kesalahan-kesalahan yang biasa dinilai dari sudut pandang sebagai

sesuatu yang memalukan. Oleh karena itu, suatu dialog dalam perbandingan agama harus selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal yang dimiliki agama lain yang hendak dibandingkan, dan realitas agama—baik yang agung atau yang memalukan—dengan realitas agama lain yang agung atau memalukan itu dengan demikian, akan dapat terhindar dari suatu penilai standar ganda dalam melihat agama lain.

SIMPULAN

Kalau tujuan akhir pendidikan adalah perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh hati, sehingga akan mendorongnya untuk mengambil keputusan untuk berubah. Pendidikan agama Islam, dengan demikian, di samping bertujuan untuk memperteguh keyakinan pada agamanya, juga harus diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan solidaritas terhadap sesama. Maka, dalam hal ini, semua materi buku-buku yang diajarkannya tentunya harus menyentuh tentang isu pluralitas. Dari sinilah kemudian kita akan mengerti urgensinya untuk menyusun bentuk kurikulum pendidikan agama berbasis pluralis agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifi, al-Hadi, Muhammad. 1964. *al-Tarbiyah wa al-Taghoyyur al-Tsaqafi*. Kairo: Maktabah Angelo al-Mishriyyah.
- Allen, Douglas. 1978. *Structure and Creativity in Religion*. The Hague the Netherlands: Moutan Publisher

- Arkoun, Mohammed. 2001. *Islam Kontemporer: menuju Dialog antar agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Abdullah, Amin, M. 1999. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. 1998. *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisme Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Barnadib, Imam. 1994. *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Basri, Ghazali, at. a, 1991. *An Integrated Education System in a Multifaith and Multicultural Country*. Malaysia: Muslim Yuth Movement Malaysia
- Basuki, A. Singgih. 1999. Kesatuan dan Keragaman Agama dalam Pandangan Hazrat Inayat Khan. *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. VIII. No. 21: 151.
- Beck, Clive. 1990. *Better Schools: A Value Perspective*, Britain: The Falmer Press with Taylor and Francis ICC.
- Bogdan, C. Robert and Biklen, Sari Knoop. *Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Methode*. Boston: Allyn and Bacon, 1993: 2.
- Bulac, Ali, 1998, "The Medina Document", dalam Charles Kurzman (eds.), *Liberal Islam*, New York: Oxford University Press.
- Darmaningtyas. 1999. *Pendidikan Pada Dan Setelah Krisis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dawam, Ainurrofiq. 2003. *Emoh Sekolah*. Yogyakarta: Inspeal Ahimsa Karya Press.
- Dewey, John. 1916. *Democracy and Education*. New York: Macmillan Press.
- Durkheim, E. 1961. *Moral Education*, New York: The Free Press.
- Effendy, Bachtiar. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralis Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press.
- Esack, Farid. 2000. *Qur'an, Liberation, and Pluralism*, terj. Watung A. Budiman. Bandung: Mizan.
- Faruqi, Isma'il dan Lois Lamya al-Faruqi. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Hasan, S. Hamid. 2000. Pendekatan Multikultural Untuk Penyempurnaan Kurikulum Nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. V. No. 2: 510-524.
- Hick, John. 1963. *Philosophy of Religion*, New Delhi: Prentice Hall.
- Hidayat, Komaruddin. 1998. *Tragedi Raja Midas*, Jakarta: Paramadina.
- Khishbiyah, Yayah. at. al. 2000. "Mencari Pendidikan Yang Menghargai Pluralis" dalam, *Membangun Masa Depan Anak-anak Kita*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mouw, Richard J and Griffon, Sander. 1993. *Pluralism and Horizon*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2002. *Nalar Spritual Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nasr, Sayyed Hossein. 1980. *Living Sufism*, London: Unwin Paperback.
- Rachman, Budi Munawar. 2001. *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina.
- Rahmat, Jalaluddin. 1997. *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan.
- Rodger, Alex R. 1982 *Educational and Faith in Open Society*, Britain: The Handel Press.
- Sealy, John. 1985. *Religious Education Philosophical Perspective*, London: George Allen & Unwin
- Shihab, Alwi. 2001. *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan.

Siradj, Said Aqiel. 1999. *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Pustaka Ciganjur.

Smith, W. C. 1981. *Toward Theology: Faith and the Comparative History of Religion*, London & Basingstoke: The Macmillan Press.

Sumartana, et al. 2001. *Pluralis, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tilar, H. A. R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.